MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 2 Tahun 2026

KONSEP DAN PILAR SDGS (17 TUJUAN SDGS DAN KETERKAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA)

Riski Rahayu, Muhammad Anasrulloh
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Bhinneka PGRI
Email: riskirahayu27@gmail.com[1] , m.anasrulloh@ubhi.ac.id[2]

Abstract
Sustainable Development Goals (SDGs) represent a global development agenda agreed upon by nations to integrate 17 sustainable development goals. These goals encompass social, economic, and environmental pillars, viewed as an inseparable and mutually influential unity. This study focuses on describing the concepts and pillars of the SDGs, aligned with the 17 goals and their relevance to economic development in Indonesia. The methodology employed is descriptive-qualitative, supported by a comprehensive literature review. The findings highlight the critical importance of digital economic integration in Indonesia to harmonize productivity with environmental considerations. The e-commerce, fintech, and precision agriculture sectors serve as primary drivers in empowering SMEs and achieving the SDGs through resource efficiency and sustainable business practices
Keywords: SDGs, Economic Development, Indonesia

Abstrak
SDGs (Sustainable Development Goal) adalah agenda pembangunan internasional yang menjadi kesepakatan bangsa bangsa yang mengintergrasikan 17 tujuan pembangunan berkalanjutan dengan mencakup pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dan saling memengaruhi. Kajian ini berfokus pada deskripsi konsep dan pilar pada SDGs yang disesuaikan dengan 17 Tujuan SDGs dan keterkaitannya dengan pembangunan ekonomi di indonesia. Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, didukung oleh tinjauan literatur yang komprehensif. Temuan dari kajian ini menyoroti pentingnya integrasi ekonomi digital di Indonesia dalam mengharmonisasikan produktivitas dan aspek lingkungan. Sektor e-commerce, fintech, dan pertanian presisi menjadi penggerak utama dalam pemberdayaan UKM serta pencapaian SDGs melalui efisiensi sumber daya dan praktik bisnis berkelanjutan.
Kata Kunci: ***SDGs, Pembangunan Ekonomi, Indonesia***.

Article history
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

1. Pendahuluan

Lahirnya Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tidak dapat dipisahkan dari evaluasi kritis terhadap agenda pembangunan global sebelumnya, yakni Millennium Development Goals (MDGs), yang berakhir pada tahun 2015. Meskipun MDGs mencatatkan keberhasilan parsial, terutama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem, agenda ini mewarisi sejumlah kelemahan struktural yang fundamental. MDGs dirancang dengan pendekatan top-down yang didominasi oleh negara-negara maju, sehingga gagal menciptakan rasa kepemilikan yang kuat di negara-negara berkembang dan keliru memposisikan pembangunan hanya sebagai agenda bagi "Global South" (Diouf, 2019).

Lebih krusial lagi, MDGs dikritik tajam karena fokusnya pada data rata-rata nasional yang secara efektif mengabaikan masalah kesenjangan yang kian melebar, sehingga banyak

ISSN : 3025-9495

kelompok rentan justru tertinggal (Wang & Chen, 2024). Dari segi cakupan, MDGs juga dinilai tidak komprehensif, isu kelestarian lingkungan diperlakukan sebagai struktur fisik yang terpisah alih-alih fondasi pembangunan, sementara pilar-pilar fundamental seperti perdamaian, keadilan, kelembagaan yang kuat, serta pendorong ekonomi inti seperti pekerjaan layak dan infrastruktur hampir sepenuhnya absen. Kegagalan-kegagalan inilah terutama dalam mengintegrasikan pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan serta mengatasi akar masalah seperti tata kelola yang buruk yang menciptakan urgensi global untuk merumuskan kerangka pembangunan baru yang lebih universal, inklusif, dan terintegrasi, yang kemudian terwujud dalam SDGs (Oleribe & Taylor-Robinson, 2016).

Sebagai agenda pembangunan global yang menggantikan MDGs, Sustainable Development Goals (SDGs) dirumuskan untuk periode 2030 melalui konsensus yang ambisius, yang disepakati oleh seluruh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini dirancang dengan tiga sifat fundamental yang membedakannya secara radikal dari pendahulunya: ia bersifat universal, terintegrasi, dan transformatif," karena tidak hanya menargetkan pencapaian evolusioner, tetapi juga menyerukan perubahan fundamental dalam cara masyarakat, tata kelola, dan model ekonomi global beroperasi untuk menjamin keberlanjutan bagi planet dan manusia (Le Blanc, 2015).

Salah satu pergeseran konseptual paling fundamental yang membedakan SDGs dari MDGs adalah adopsi kerangka kerja yang secara holistik menyeimbangkan tiga dimensi inti pembangunan berkelanjutan: sosial, lingkungan, dan ekonomi. Ekonomi tidak lagi dipandang sebagai tujuan yang terisolasi, melainkan sebagai pendorong (driver) esensial yang menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan sosial (seperti pendidikan dan kesehatan) serta sebagai tujuan (objective) itu sendiri yang harus dicapai secara inklusif dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa kemakmuran tidak diraih dengan mengorbankan integritas ekologi (Nilsson et al., 2016).

Pentingnya memahami secara mendalam keterkaitan antara 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pembangunan ekonomi adalah hal yang krusial untuk memastikan keberlanjutan dan keefektifan kebijakan nasional. Keterkaitan ini menuntut pergeseran paradigma menuju pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan (Green Economy), memastikan bahwa manfaat ekonomi terdistribusi secara adil (inklusif) dan tidak melampaui batas daya dukung lingkungan (ramah lingkungan), yang pada konteks Indonesia memerlukan integrasi strategis antara Tujuan Ekonomi dan Tujuan Lingkungan untuk mencapai kualitas pertumbuhan yang berkelanjutan (Puja Pangestu et al., 2021).

2. Metodologi Penelitian

Kajian ini mengadopsi pendekatan deskriptif dengan fokus pada pengumpulan data-data relevan yang bersumber dari studi kepustakaan. Sumber literatur yang dimanfaatkan meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, dan sumber daring, yang semuanya didasarkan pada penelitian sebelumnya. Prosedur metodologis ini melibatkan penelaahan komprehensif terhadap berbagai sumber, kemudian mengaitkannya dengan topik yang sedang dibahas untuk selanjutnya disajikan dalam format deskriptif. Selain itu, dilakukan pula tinjauan literatur (review) dengan kata kunci "Konsep, Pilar dan Implementasi SDGs" dari periode 2015 hingga 2025.

3. Hasil dan Pembahasan

Konsep dan Pilar SDGs

Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang menjadi fondasi bagi SDGs berakar kuat pada definisi klasik yang pertama kali dipublikasikan dalam laporan Brundtland Report (*Our Common Future*) pada tahun 1987. Laporan tersebut mendefinisikan

ISSN : 3025-9495

pembangunan berkelanjutan sebagai "pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri." Definisi ini merupakan tonggak penting karena menempatkan keberlanjutan lingkungan pada jantung agenda pembangunan global, secara eksplisit menuntut keseimbangan antar generasi dan menggeser fokus dari model pembangunan konvensional (Suparmoko, 2020).

Dalam (Pradhan et al., 2017) konsep fundamental yang menopang *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan memastikan sifatnya yang terintegrasi adalah kerangka kerja Lima Pilar (5P), yang merupakan prinsip panduan dalam implementasinya di seluruh dunia. Kelima pilar ini harus diwujudkan secara simultan dan mencakup dimensi sosial, lingkungan, dan ekonomi secara seimbang yaitu Pilar People (Manusia), Planet (Bumi), Pilar Prosperity (Kemakmuran), Pilar Peace (Perdamaian), Partnership (Kemitraan) dan memastikan tidak ada negara atau kelompok yang tertinggal dalam mencapai agenda 2030. Menurut (Raharjo, 2021) di Indonesia, kerangka 5P ini menjadi panduan strategis dalam perencanaan pembangunan nasional, memastikan semua pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang saling terkait tersebut.

Prinsip yang menyatukan pilar ini adalah Interdependensi yaitu prinsip inti yang menjiwai Lima Pilar (5P) SDGs, menegaskan bahwa pencapaian tujuan global tidak dapat dilakukan secara parsial. Prosperity (Kemakmuran), yang mencakup pembangunan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan, tidak akan pernah dapat dicapai jika Planet (Bumi) mengalami kerusakan ekologis yang meluas, sebab sumber daya alam yang menopang ekonomi akan terkikis, kemakmuran didasarkan pada People (Manusia) yang sehat, berpendidikan, dan setara, karena investasi dalam modal manusia. Lebih lanjut, tanpa adanya Peace (Perdamaian), stabilitas politik, dan institusi yang adil, serta Partnership (Kemitraan) global yang kuat untuk memobilisasi dana dan teknologi yang diperlukan, menegaskan bahwa 5P ini membentuk sebuah jejaring yang saling memperkuat untuk Agenda 2030 (Pradhan et al., 2017)

Namun, konsep kemakmuran ini harus dipahami secara kontekstual, yang menuntut adanya perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dalam konteks SDGs. (Chakrabarti & Dhar, 2017) menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang sangat krusial dalam konteks SDGs. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara sempit dan kuantitatif, yang utamanya diukur melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan per kapita suatu negara, mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa.

Sebaliknya, pembangunan ekonomi memiliki dimensi yang jauh lebih luas dan bersifat kualitatif, melampaui sekadar angka PDB dengan melibatkan perubahan struktural (transformasi dari sektor agraris ke industri dan jasa), peningkatan kualitas hidup masyarakat, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan inklusivitas dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, suatu negara dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diiringi pembangunan ekonomi yang memadai, menghasilkan pembangunan yang tidak merata dan tidak berkelanjutan, yang menjadi fokus kritik dan perbaikan dalam Agenda SDGs (Wang & Chen, 2024).

Untuk mengatasi dilema pertumbuhan yang tidak inklusif dan tidak ramah lingkungan tersebut (Zhironkin & Cehlár, 2022) dalam Konsep Ekonomi Hijau (*Green Economy*) dan Pertumbuhan Inklusif (*Inclusive Growth*) berfungsi sebagai jembatan teori yang vital untuk menyelaraskan pembangunan ekonomi konvensional dengan prinsip keberlanjutan SDGs. Dalam kerangka SDGs, di mana *Prosperity* (Kemakmuran) tidak boleh mengorbankan *Planet* (Bumi) atau *People* (Manusia), Ekonomi Hijau menyediakan model operasional yang mempromosikan pertumbuhan PDB dengan mengurangi polusi, emisi karbon, dan penggunaan sumber daya yang tidak efisien, sekaligus menciptakan pekerjaan hijau baru.

ISSN : 3025-9495

Sementara itu, Pertumbuhan Inklusif memastikan bahwa manfaat ekonomi yang dihasilkan didistribusikan secara adil, mengurangi kesenjangan (sejalan dengan SDG 10), dan melibatkan partisipasi penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, kedua konsep ini menjadi perangkat penting untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang selaras dengan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan) dalam Agenda 2030 (Pedersen et al., 2023).

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah serangkaian 17 tujuan global yang disepakati oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015. Agenda ini berlaku universal dan bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan hidup pada tahun 2030 (Pedersen et al., 2023). Di Indonesia, pelaksanaan SDGs dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, yang mengelompokkan 17 tujuan tersebut mencerminkan sifatnya yang terintegrasi (Statistik, 2016). Berikut adalah gambar 17 tujuan SDGs:



Gambar 1. Tujuan SDGs

Dari gambar diatas akan dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

Tabel 1. Penjelasan Tujuan SDGs

No	Tujuan (Goal)	Penjelasan Singkat	Pilar
1	**Tanpa Kemiskinan** (*No Poverty*)	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan di mana pun dan memastikan semua orang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dasar dan perlindungan sosial.	**People**
2	**Tanpa Kelaparan** (*Zero Hunger*)	Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang lebih baik, serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.	**People**
3	**Kehidupan Sehat dan Sejahtera** (*Good Health and Well-being*)	Menjamin kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua usia, termasuk pengurangan angka kematian ibu dan bayi serta memerangi penyakit menular.	**People**

ISSN : 3025-9495

No	Tujuan (Goal)	Penjelasan Singkat	Pilar
4	**Pendidikan Berkualitas** (*Quality Education*)	Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.	**People**
5	**Kesetaraan Gender** (*Gender Equality*)	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan di segala bidang kehidupan.	**People**
6	**Air Bersih dan Sanitasi Layak** (*Clean Water and Sanitation*)	Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	**Planet**
7	**Energi Bersih dan Terjangkau** (*Affordable and Clean Energy*)	Menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	**Prosperity**
8	**Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi** (*Decent Work and Economic Growth*)	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan stabil, serta pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua.	**Prosperity**
9	**Industri, Inovasi, dan Infrastruktur** (*Industry, Innovation, and Infrastructure*)	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	**Prosperity**
10	**Berkurangnya Kesenjangan** (*Reduced Inequalities*)	Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan antar negara, termasuk ketidaksetaraan pendapatan, sosial, dan regional.	**Peace**
11	**Kota dan Permukiman Berkelanjutan** (*Sustainable Cities and Communities*)	Menjadikan kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	**Planet**
12	**Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab** (*Responsible Consumption and Production*)	Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, termasuk pengelolaan limbah yang efisien dan penggunaan sumber daya yang bijaksana.	**Planet**
13	**Penanganan Perubahan Iklim** (*Climate Action*)	Mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.	**Planet**
14	**Ekosistem Lautan** (*Life Below Water*)	Mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembangunan berkelanjutan.	**Planet**

ISSN : 3025-9495

No	Tujuan (Goal)	Penjelasan Singkat	Pilar
15	**Ekosistem Daratan** (*Life On Land*)	Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem daratan secara berkelanjutan, mengelola hutan secara lestari, dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.	**Planet**
16	**Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh** (*Peace, Justice and Strong Institutions*)	Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan untuk semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif.	**Peace**
17	**Kemitraan untuk Mencapai Tujuan** (*Partnerships for the Goals*)	Memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, mencakup mobilisasi sumber daya dan transfer teknologi.	**Partnership**

Dalam (Sorooshian, 2024) menjelaskan bahawa implementasi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) didasarkan pada kerangka kerja terintegrasi yang terdiri dari Lima Pilar Utama (5P), yang menegaskan bahwa dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan harus diupayakan secara simultan. Pilar People (Manusia) berfokus pada kesejahteraan dan inklusivitas sosial, mencakup Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), 2 (Tanpa Kelaparan), 3 (Kehidupan Sehat), 4 (Pendidikan Berkualitas), 5 (Kesetaraan Gender), dan 6 (Air Bersih dan Sanitasi). Pilar Prosperity (Kemakmuran) mengarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan teknologi, meliputi Tujuan 7 (Energi Bersih), 8 (Pekerjaan Layak & Pertumbuhan Ekonomi), 9 (Industri & Infrastruktur), 10 (Mengurangi Kesenjangan), dan 11 (Kota Berkelanjutan). Selanjutnya, pilar Planet (Bumi) menekankan perlindungan lingkungan dan konservasi sumber daya, mencakup Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), 13 (Aksi Iklim), 14 (Ekosistem Laut), dan 15 (Ekosistem Darat). Terakhir, pilar Peace (Perdamaian) dan Partnership (Kemitraan) bertindak sebagai sarana pendukung, yang terdiri dari Tujuan 16 (Keadilan & Institusi Kuat) dan 17 (Kemitraan Global), yang sangat esensial untuk memfasilitasi pencapaian 15 tujuan lainnya (Pradhan et al., 2017).

Dalam (Gupta, 2024) Keberhasilan ambisi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara fundamental bergantung pada kondisi dunia yang damai, aman, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), bukan pada dunia yang justru mengutamakan investasi persenjataan daripada pembangunan berkelanjutan. Dibandingkan pendahulunya, SDGs jauh lebih unggul karena dibuat melalui negosiasi global yang inklusif (melibatkan negara berpendapatan rendah dan menengah), mengintegrasikan secara eksplisit prinsip-prinsip HAM untuk memerangi diskriminasi dan kemiskinan, serta secara aktif memberikan peran besar kepada sektor swasta. Selain itu, SDGs adalah program yang sangat inklusif dengan target spesifik untuk penyandang disabilitas dan situasi darurat, didukung oleh indikator yang membuka peluang lebar bagi keterlibatan masyarakat sipil, dan mendapatkan momentum tambahan melalui sinergi dengan Perjanjian Iklim Paris (COP21).

Keterkaitan dengan Pembangunan Ekonomi

Hubungan antara pembangunan ekonomi dan pencapaian tujuan SDGs lainnya bersifat fundamental dan dua arah (reciprocal), menegaskan sifat Agenda 2030 yang terintegrasi. Pertama, pembangunan ekonomi, yang diwujudkan melalui SDG 8 (Pekerjaan Layak dan

ISSN : 3025-9495

Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), bertindak sebagai syarat dan pendorong utama yang menghasilkan sumber daya finansial (seperti pendapatan pajak dan investasi) yang mutlak diperlukan untuk mendanai pencapaian tujuan sosial (seperti SDG 1: Tanpa Kemiskinan, SDG 3: Kehidupan Sehat, dan SDG 4: Pendidikan Berkualitas). Kedua, hubungan ini juga berjalan sebaliknya: pencapaian tujuan sosial dan lingkungan berfungsi sebagai pondasi esensial bagi keberlanjutan ekonomi. Ekonomi tidak akan bertahan lama jika SDM-nya sakit atau tidak terampil, atau jika basis sumber daya alamnya (lingkungan) hancur. Oleh karena itu, investasi dalam *human capital* dan perlindungan ekosistem adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kokoh dalam jangka panjang (Setiawan, *et al.*, 2021).

Dalam kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs), Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) berfungsi sebagai "mesin" atau pendorong utama bagi dimensi ekonomi (Prosperity). Kedua tujuan ini berfokus pada penciptaan nilai dan kapasitas produksi yang merupakan sumber daya vital untuk mendanai seluruh agenda pembangunan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh SDG 8 dan 9 ini harus memenuhi dua kriteria utama: harus inklusif yakni mampu menciptakan pekerjaan layak (*decent work*) bagi semua orang, termasuk kelompok rentan, sehingga mengurangi kesenjangan dan harus didukung oleh inovasi serta infrastruktur yang tangguh, yang esensial untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan demikian, alih-alih sekadar menargetkan peningkatan PDB, SDG 8 dan 9 memastikan bahwa pembangunan ekonomi diarahkan pada kualitas, keberlanjutan, dan inklusivitas, menjadikannya fondasi bagi tujuan sosial lainnya (Setiawan, *et al.*, 2021).

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tidak akan pernah kokoh jika tidak didukung oleh fondasi sosial yang kuat, sebab ekonomi tidak akan tumbuh optimal jika Sumber Daya Manusianya (SDM) tidak mumpuni. Oleh karena itu, SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kesehatan), SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), dan SDG 5 (Kesetaraan Gender) adalah investasi *human capital* yang krusial bagi produktivitas jangka panjang. Penghapusan kemiskinan (SDG 1) dan peningkatan kesehatan (SDG 3) memastikan tenaga kerja memiliki kapabilitas fisik untuk bekerja, sementara akses ke pendidikan berkualitas (SDG 4) meningkatkan keterampilan dan inovasi. Lebih lanjut, memastikan kesetaraan gender (SDG 5) adalah instrumen utama untuk mengoptimalkan potensi setengah dari populasi, yang secara langsung meningkatkan partisipasi angkatan kerja dan efisiensi ekonomi. Dengan kata lain, investasi sosial ini mentransformasi populasi menjadi aset produktif, memastikan bahwa mesin ekonomi (SDG 8 & 9) memiliki bahan bakar berkualitas untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (Nurhayati, 2023).

Batasan lingkungan dalam SDGs, yang tercermin dalam Pilar Planet, menegaskan aspek "berkelanjutan" dari pembangunan. Pilar ini, yang meliputi SDG 12 (Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab), SDG 13 (Aksi Iklim), SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan SDG 15 (Ekosistem Daratan), SDGs secara eksplisit mengharuskan ekonomi global untuk beralih secara transformatif menuju model Ekonomi Sirkular (*Circular Economy*) atau Ekonomi Hijau (*Green Economy*), di mana limbah dan polusi diminimalkan, produk dan material terus digunakan kembali, dan modal alam dilindungi, memastikan pembangunan ekonomi dapat dilakukan tanpa merusak daya dukung lingkungan (Ruslan et al., 2020).

Pembangunan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan sangat bergantung pada pilar kelembagaan yang kuat, yang diwujudkan melalui SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh). Kesenjangan yang tinggi (SDG 10) merupakan penghambat ekonomi karena membatasi potensi pasar domestik dan menciptakan instabilitas sosial. Lebih krusial lagi, SDG 16 menekankan bahwa stabilitas hukum, transparansi, dan pemberantasan korupsi adalah syarat mutlak bagi terciptanya iklim

ISSN : 3025-9495

investasi yang sehat. Institusi yang lemah, korup, atau tidak stabil akan meningkatkan biaya transaksi, menghambat kepercayaan investor, dan mendistorsi alokasi sumber daya. Oleh karena itu, tujuan ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat dan beroperasi dalam lingkungan hukum yang prediktif dan tata kelola yang akuntabel (Zen & Mageiasti, 2025)

Implementasi SDGs di Indoensia

Di Indonesia dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mengadopsi tiga pilar utama yaitu universalitas, integrasi, dan *No One Left Behind* (Putra & Suflani, 2022). Prinsip universalitas, yang menuntut penerapan program SDGs secara merata di seluruh wilayah Indonesia, sejalan dengan komitmen global yang mengharuskan partisipasi semua negara, baik maju maupun berkembang. Prinsip integrasi memastikan bahwa pelaksanaan program pembangunan dilakukan secara sinergis dan terhubung erat di seluruh spektrum sosial, ekonomi, dan lingkungan; kerangka kerja ini telah menjadi fondasi utama dalam perumusan rencana aksi, program, dan alokasi dana. Terakhir, prinsip vital "*No One Left Behind*" menjamin bahwa manfaat pembangunan harus menjangkau setiap individu, khususnya kelompok rentan, serta menegaskan perlunya keterlibatan aktif dari semua pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses implementasi (Statistik, 2016).

Bagi Indonesia, integrasi ini memiliki implikasi yang mendalam, karena negara ini berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pertimbangan lingkungan. Ekspansi pesat ekonomi digital telah menciptakan peluang untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan (Pratama et al., 2024). Secara khusus, munculnya e-commerce, fintech, dan solusi pembayaran digital dapat memfasilitasi biaya transaksi yang lebih rendah dan akses pasar yang lebih baik bagi usaha kecil dan menengah (UKM) sekaligus mempromosikan praktik ramah lingkungan (Kharisma, 2020). Contoh integrasi ini dapat dilihat di sektor pertanian, di mana alat digital memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya melalui pertanian presisi, yang secara langsung berkontribusi pada SDGs terkait ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan (Yin, 2024).

Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan langkah krusial untuk agenda global, dengan program spesifik yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun upaya ini memberikan dampak positif, seperti dukungan UMKM dan kebijakan lingkungan, implementasinya menghadapi serangkaian tantangan kompleks, mulai dari isu pendidikan, reformasi birokrasi, koordinasi kelembagaan, penegakan hukum, hingga pengelolaan sumber daya alam. Untuk menanggulangi hambatan-hambatan yang saling terkait ini dan menjamin tercapainya SDGs secara berkelanjutan, kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi dan komitmen inklusif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, yang harus diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Zen & Mageiasti, 2025).

5.Kesimpulan

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan agenda komprehensif global untuk tahun 2030 yang dirancang untuk memperbaiki kelemahan agenda sebelumnya. Berbeda dengan pendekatan parsial, SDGs disatukan oleh kerangka kerja Lima Pilar (5P): People (Manusia), Planet (Bumi), Prosperity (Kemakmuran), Peace (Perdamaian), dan Partnership (Kemitraan). Pilar-pilar ini membentuk dasar bagi 17 tujuan pembangunan yang tidak dapat dipisahkan (terintegrasi), yang berarti kemajuan di satu tujuan (seperti ekonomi atau kesehatan) akan bergantung pada kemajuan di tujuan lainnya (seperti perlindungan lingkungan dan tata kelola yang baik). Kesatuan struktural ini memastikan bahwa SDGs

ISSN : 3025-9495

berupaya mencapai keseimbangan antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara simultan.

Keterkaitan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan pembangunan ekonomi adalah hubungan yang sangat erat dan bersifat simbiosis mutualisme, di mana kedua pihak saling bergantung dan memperoleh manfaat. Pembangunan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai tujuan (SDG 8 & 9), tetapi juga merupakan alat penting yang menghasilkan sumber daya finansial (pendapatan, investasi) untuk mencapai tujuan sosial (seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesehatan). Namun, agar hubungan ini berkelanjutan, pembangunan ekonomi mutlak harus dibatasi oleh daya dukung lingkungan (melalui SDG 12, 13, 14, dan 15) untuk mencegah kerusakan sumber daya alam. Selain itu, pembangunan ekonomi harus didukung oleh kelembagaan yang kuat dan adil (melalui SDG 10 dan 16) untuk menjamin stabilitas hukum, pemberantasan korupsi, dan pemerataan manfaat ekonomi. Kesatuan yang terintegrasi ini memastikan bahwa kemakmuran yang dicapai hari ini tidak merusak fondasi sosial dan lingkungan bagi generasi mendatang

Implementasi SDGs di Indonesia berpijak pada tiga prinsip utama: universalitas, integrasi, dan No One Left Behind. Strategi ini diwujudkan melalui pengintegrasian target global ke dalam RPJMN dengan memanfaatkan ekonomi digital seperti e-commerce, fintech, dan pertanian presisi sebagai katalisator untuk menyeimbangkan produktivitas ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Meskipun transformasi ini membuka peluang besar bagi pemberdayaan UKM dan efisiensi sumber daya, keberhasilannya masih dibatasi oleh tantangan birokrasi, koordinasi kelembagaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, pencapaian Agenda 2030 di Indonesia sangat bergantung pada kolaborasi inklusif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Chakrabarti, A., & Dhar, A. (2017). Economic Development. In Routledge Handbook of Marxian Economics. https://doi.org/10.4324/9781315774206-29

[2] Diouf, G. (2019). Millenium Development Goals (MDGs) dan Sustainable Development Goals (SDGs). International Journal Ofd Science and Society, 1(4), 1–49. https://www.scribd.com/document/381167650/MDG-dan-SDG-docx

[3] Gupta, B. G. (2024). Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Pengentas Kemiskinan. Urban Sustainability, Part F4098, 41–65. https://doi.org/10.1007/978-981-96-0857-7_4
Kharisma, D. B. (2020). Urgency of fi nancial technology (Fintech) laws in Indonesia. Figure 1. https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233

[4] Le Blanc, D. (2015). The sustainable development goals as a network of targets. Monitoring and Evaluation NEWS. Department of Economic and Social Affairs, 1(141), 1–17. http://www.un.org/esa/desa/papers/2015/wp141_2015.pdf

[5] Nilsson, M., Griggs, D., & Visbeck, M. (2016). Policy: Map the interactions between Sustainable Development Goals. Nature, 534(7607), 320–322. https://doi.org/10.1038/534320a

[6] Oleribe, O. O., & Taylor-Robinson, S. D. (2016). Before sustainable development goals (SDG): Why Nigeria failed to achieve the millennium development goals (MDGs). Pan African Medical Journal, 24, 1–4. https://doi.org/10.11604/pamj.2016.24.156.8447

[7] Pedersen, A. B., Hickmann, T., Renn, O., Eckert, N., Jax, K., Lepenies, R., Liu, H. Y., Lyytimäki, J., Reis, S., & Rusch, G. (2023). SDGs at the halfway point: How the 17 global goals address risks and wicked problems. Ambio, 52(4), 679–682. https://doi.org/10.1007/s13280-023-01837-0

[8] Pradhan, P., Costa, L., Rybski, D., Lucht, W., & Kropp, J. P. (2017). A Systematic Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions. Earth's Future, 5(11), 1169–1179. https://doi.org/10.1002/2017EF000632

[9] Pratama, I. W. A., Desak, N., & Santi, M. (2024). Optimization of Human Resources and Utilization of Information Technology in Driving the Digital Economy. 2(01), 49–57.

[10] Puja Pangestu, F., Shelvia Rahmadianti, N., Tanzila Hardiyanti, N., & Yusida, E. (2021). Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan, 1(3), 2021. www.globalgoals.org

[11] Putra, A. R., & Suflani. (2022). Sustainable Development Goals Dalam Pembangunan. Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance, 2(3), 316–325.

[12] Ruslan, A., Ananda Firdaus, P., Hasbi Hidayatullah, M., Navy Saputra, R., Aisyah Matos, G., & Alfa Salam, H. (2020). Inovasi Dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya. Jbee, 2(1), 2020. http://jurnal.shantibhuana.ac.id/jurnal/index.php/bee

[13] Sorooshian, S. (2024). The sustainable development goals of the United Nations: A comparative midterm research review. Journal of Cleaner Production, 453(July 2023), 142272. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.142272

[14] Statistik, B. P. (2016). Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia. In Katalog BPS. https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3 BPS Potret Awal TPB di Indonesia.pdf

[15] Suparmoko, M. (2020). Pembangunan Nasional Dan Regional. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9(1), 39–50.

[16] Wang, B., & Chen, T. (2024). What do the sustainable development goals reveal, and are they sufficient for sustainable development? PLoS ONE, 19(11 November), 1–23. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0310089

[17] Yin, S. (2024). New Trends in Sustainable Development for Industry 5 . 0 : Digital Green Innovation Economy. 2(August 2023), 269–276. https://doi.org/10.47852/bonviewGLCE32021584

[18] Zen, N. H., & Mageiasti, L. (2025). Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 3, 775–785.

[19] Zhironkin, S., & Cehlár, M. (2022). Green Economy and Sustainable Development: The Outlook. Energies, 15(3). https://doi.org/10.3390/en15031167